



LPPD

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAHAN**

**Dinas Lingkungan Hidup
dan Perhubungan
Kabupaten Boalemo**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025.

Pelaporan Kinerja Merupakan satu komponen dalam Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan pada Instansi Pemerintah atas penggunaan Anggaran, di mana SAKIP itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/capaian kinerja pelayanan OPD.

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah di capai, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah, serta dapat di gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo.

TILAMUTA, Desember 2025

Plt.KEPALA DINAS



Drs.TEGUH JATMIKA

Pembina Utama Muda

Nip. 19690724 199404 1 001



DAFTAR ISI

Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1 Landasan Hukum	2
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	5
1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	18
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 Rencana Stategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029.....	18
2.1 Perjanjian Kinerja (PK).....	23
BAB III.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo	26
3.2 Pengukuran Kinerja	27
3.3 Evaluasi dan Capaian Kinerja	31
3.4 Sasaran Strategis :	32
3.5 Analisis Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya	43
3.6 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya.....	45



3.7 Realisasi Anggaran	49
BAB IV	51
P E N U T U P.....	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	51



DAFTAR TABEL

TABEL. 2.1	TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN KINERJA
TABEL 2.2	RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
TABEL 2.3	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TABEL 3.1	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA
TABEL 3.2	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
TABEL 3.3	PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TABEL 3.4	PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/ kabupaten/ kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Perwujudan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan pengaplikasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi.

Kewajiban semua instansi pemerintah menyusun PK, RKT dan LAKIP setiap tahunnya di dasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan pelaksanaan akuntabilitas kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk laporan kinerja tahunan atau lebih LAKIP. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan



laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo tertuang dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo, dan selanjutnya di rubah dalam bentuk Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Selain itu, dalam penyusunannya juga harus memperhatikan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 juga mengukur IKU dengan mengacu pada Permen PAN Nomor Per/20/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Selain itu, substansi IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo diukur dan dianalisa kinerjanya mengacu pada Indikator Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan

Secara keseluruhan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian tujuan dan sasaran strategis dinas sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan selama Tahun 2025.

1.1 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :



- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54614);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 dimaksudkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi pencapaian kinerja sasaran strategis dinas sesuai IKU yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025;
- b. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025 ;
- c. Sebagai acuan untuk perencanaan kinerja dan kegiatan di tahun mendatang.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025;
- b. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output selama Tahun 2025;
- c. Menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana selama Tahun 2025;



- d. Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan selama Tahun 2025;
- e. Mengetahui kekuatan dan kelemahan serta kendala dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2025;
- f. Memberikan umpan balik yang berkesinambungan dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal dinas di tahun mendatang.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dan dekosentrasi dibidang perhubungan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas lingkungan hidup dan perhubungan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.



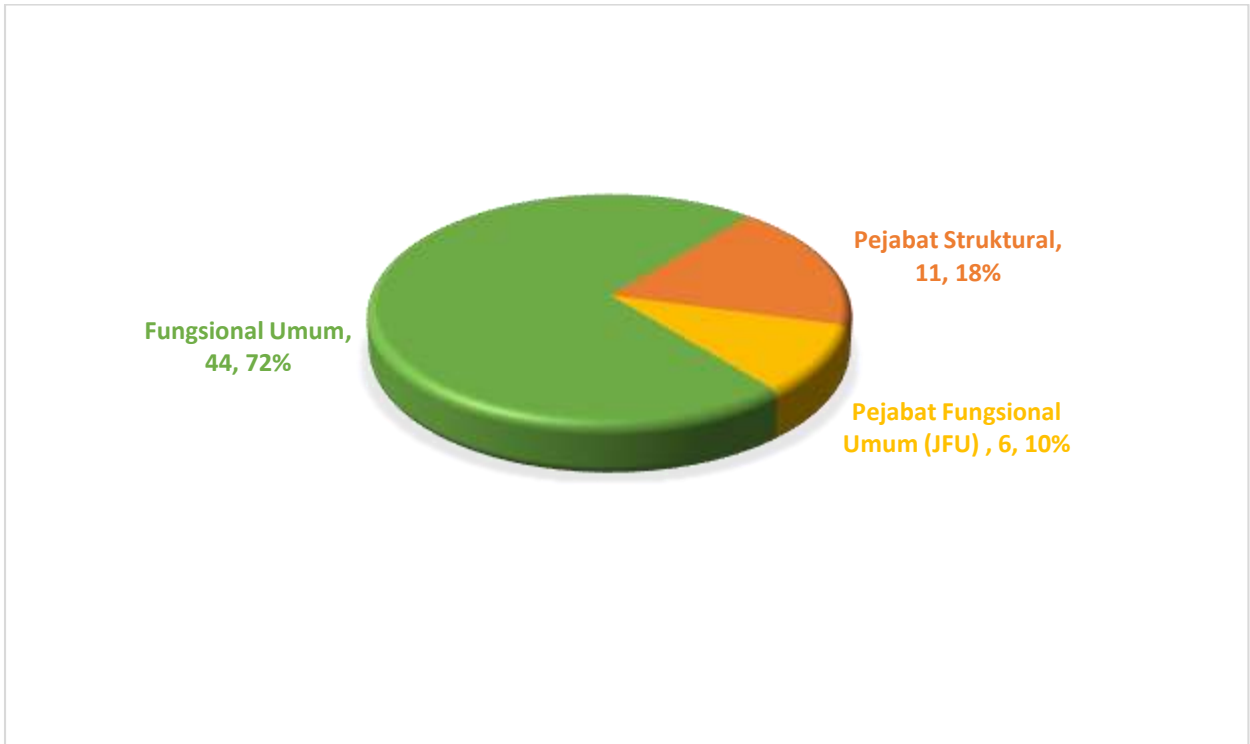
1.4.1 Susunan Kepegawaian Dan Sarana Prasarana

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
3. Bidang Penataan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Bangunan,
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian dan Pencemaran
5. Bidang Perhubungan, yang membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan
 - b. Seksi Prasarana dan Keselamatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

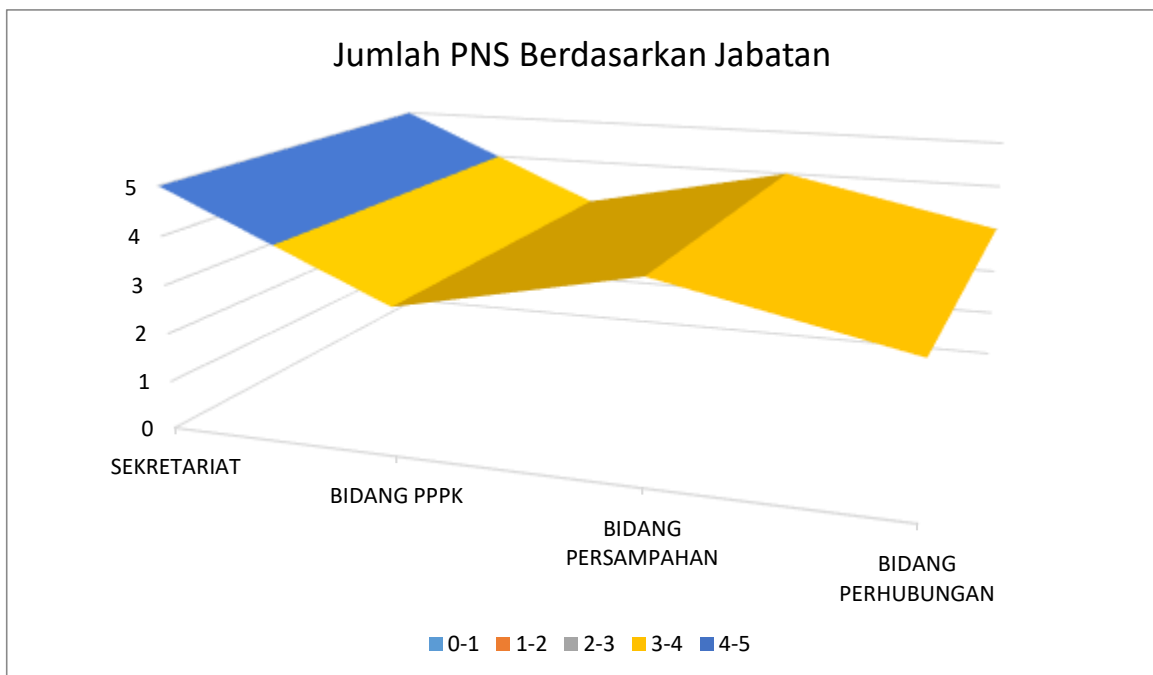
Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo dapat digambarkan sebagai berikut berikut.





Gambar 1.
Kondisi Jumlah PNS berdasarkan Jabatan per Akhir Desember 2025
Sumber :Subag Umum dan Kepegawaian

Adapun jumlah ASN berdasarkan Jabatannya pada setiap bidang secara rinci dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

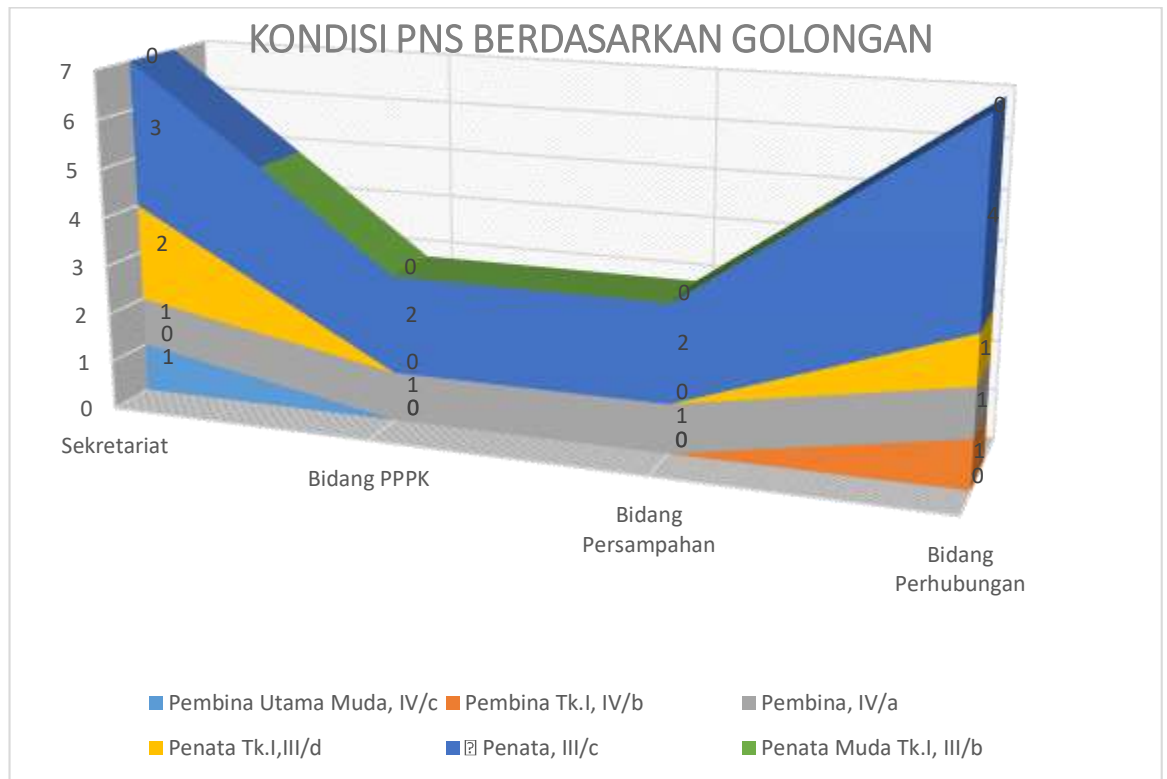


Gambar 1.3
Jumlah PNS berdasarkan Jabatan per Akhir Desember 2025
Sumber :Subag Umum dan Kepegawaian

- ❖ Menurut Pangkat/Golongan Ruang terdiri dari :
 - ✓ Pembina Utama Muda, IV/c : 1 Orang
 - ✓ Pembina Tk.I, IV/b : 1 Orang
 - ✓ Pembina, IV/a : 1 Orang
 - ✓ Penata Tk.I,III/d : 9 orang
 - ✓ Penata, III/c : 6 Orang
 - ✓ Penata Muda Tk.I, III/b : 2 Orang
 - ✓ Penata Muda, III/a : 12 Orang
 - ✓ Pengatur Tk.I, II/d : 18 Orang
 - ✓ Pengatur, II/c : 10 Orang
 - ✓ Pengatur Muda Tk.I, II/b : 2 Orang
 - ✓ Pengatur Muda, II/a : Orang
 - ✓ Juru Tk.I, I/d : 1 Orang
 - ✓ Juru,I/c : Orang
 - ✓ Juru Muda Tk.I, I/b : Orang
 - ✓ Juru Muda, I/a : Orang

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa, sebagian besar PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo berpangkat pengatur atau golongan II yakni yang terbanyak pada golongan II/d. Adapun rincian PNS berdasar pangkat/ golongan di masing-masing bidang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.





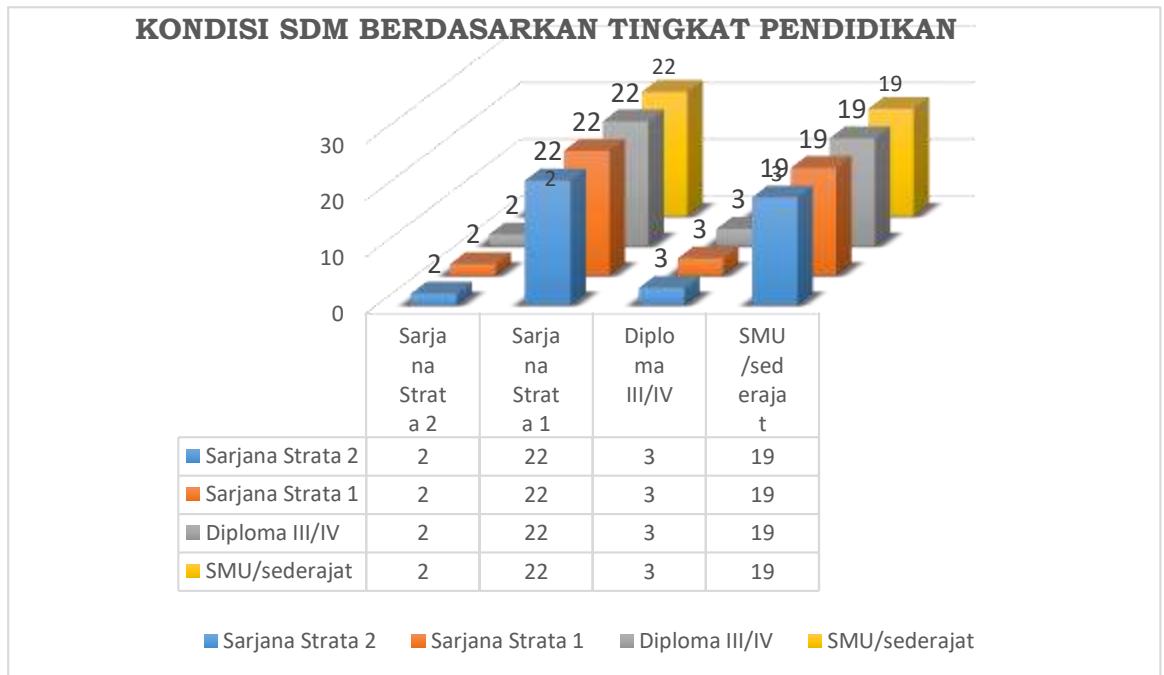
Gambar 1.4.
Kondisi PNS Berdasar Golongan Per Akhir Desember 2025

❖ Menurut Pendidikan terdiri dari :

- a. Sarjana Strata 2 : 2 orang
- b. Sarjana Strata 1 : 28 orang
- c. Diploma III/IV : 14 orang
- d. SMU/ sederajat : 50 orang
- e. SMP : 1 orang
- f. fSD : - orang

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa, sebagian besar ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan tingkat pendidikan terakhirnya adalah Strata Satu (S1). Adapun rincian PNS berdasar tingkat pendidiknya di masing-masing bidang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.





Gambar 1.5.
Kondisi SDM Berdasar Tingkat Pendidikan Per Akhir Desember 2025

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boaleo sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas adalah berikut :



Tabel 1.2
Aset Gedung dan Bangunan

No	Nama Barang	Uraian		Kondisi
1	Kantor Induk	✓ Lokasi ✓ Luas Tanah ✓ Asal Usul Tanah ✓ Status Tanah ✓ Luas Bangunan	✓ Tilamuta ✓ 2635,5 M ² ✓ Pembelian ✓ Tanah milik Pemda ✓ 0	Baik
2	Terminal Angkutan Umum	✓ Lokasi ✓ Tipe ✓ Luas tanah ✓ Asal - Usul Tanah ✓ Status tanah ✓ Luas Bangunan	✓ Tilamuta ✓ C ✓ O ✓ Pembelian ✓ Tanah pembelian	Baik
4	Gedung Pelataran Parkir Mobil pengujian Keliling	✓ Lokasi ✓ Luas Tanah ✓ Asal - Usul Tanah ✓ Status tanah ✓ Luas bangunan	✓ Tilamuta ✓ 48 M ² ✓ Pembelian ✓ Tanah milik pemda ✓ 59 M ²	Baik
5	Pos Pemungutan Retribusi	✓ Lokasi ✓ Luas tanah ✓ Asal - Usul tanah ✓ Status tanah ✓ Luas bangunan	✓ Tilamuta, Paguyaman, mananggu ✓ 30 M ² ✓ Hibah ✓ Milik Pemda ✓ 20 M ²	Baik

Sumber : Pengurus Barang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, DLHP Kab. Boalemo, Tahun 2025



Tabel 1.3
Aset Peralatan Kantor

No	Nama Barang	Jumlah	Merk	Kondisi	Ket
1	Kendaraan roda empat	9	Toyota	Baik	✓ 1 Truk ✓ 2 Minibus
2	Kendaraan roda empat	1	Mitsubishi	Baik	✓ 3 bus
3	Kendaraan roda dua	13	Honda, Yamaha	Baik	✓ 5 motor tiger (Rusak) ✓ 8 motor bebek
3	Note book	16	Toshiba, Asus	Baik	✓ Komputer Note Book
4	Hardisk Eksternal	1	Toshiba	Baik	✓ Hardisk eksternal
5	Printer	5	Canon	Baik	✓ Printer
6	Alat uji Emisi	1	Nanhua/NHT- 6	Baik	✓ Alat uji emisi (smoke tester)
7	Alat Platform Timbangan Portable	1	CAS/RW- 2601P	Baik	✓ Alat Platform Timbangan Portable
8	Canon Scan	1	Canon Lide	Baik	✓ Canon scan
9	Theodolite	1	Nikon w20	Baik	✓ Theodolite
10	Alat GPS	1	Garmin 6Zs	Baik	✓ Alat GPS
11	Notebook	1	Acer E1-470	Baik	✓ Computer notebook
12	Laptop	2	Acer	Baik	✓ Laptop
13	Mesin Ketik Elektrik	1	Nakajima	Baik	✓ Mesin ketik elektrik untuk pengujian
14	Komputer PC All In One	1	Acer	Baik	✓ Komputer PC All In One
15	Sound System	1	Waranti	Baik	✓ Sound System
16	Pendingin ruangan	5	Panasonic	Baik	✓ AC

Sumber : Pengurus Barang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, DLHP Kab. Boalemo, Tahun 2025



1.4.3 Keuangan

Tabel 1.4
Realisasi Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Berdasarkan
Beban Pekerjaan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Keuangan	%	Keuangan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 206.304.000,00	Rp 206.304.000,00	100%	Rp 0	(0) %
1.1	Hasil Retribusi Daerah	Rp 206.304.000,00	Rp 206.304.000,00	100%	Rp 0	(0) %
2	Belanja Operasi	Rp 8.255.708.500,90	Rp 7.792.716.104	94%	Rp 462.992.396.90	59 %
2.1	Belanja Pegawai	Rp 4.332.190.021,20	Rp 4.126.395.853	95%	Rp 205.794.168.20	5%
2.1.1	Gaji dan Tunjangan	Rp 3.307.254.665.70	Rp 3.222.457.623	97%	Rp 84.797.042	3%
2.1.2	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 1.024.935.355,50	Rp 903.938.230	88%	Rp 120.997.125.50	13%
2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.660.106.899.70	Rp 3.411.636.201	93%	Rp 248.470.698.70	7%
3	Belanja Modal	Rp 263.411.580	Rp 254.684.050	97%	Rp 8.727.530	3%
3.1	Belanja Modal Tanah	Rp -	Rp -	0%	Rp 0 -	0%
3.2	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 0	Rp 0	0	0	0

Sumber : Sub Bagian Keuangan, DLHP Kab. Boalemo, Tahun 2025



1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

Adapun permasalahan utama Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo yang harus segera ditangani diantaranya sebagai berikut :

1.5.1 Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3,Pengendalian dan Pencemaran

Kondisi kualitas Lingkungan di Kabupaten Boalemo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini di sebabkan karena meningkatnya pengawasan dan pemantauan lingkungan yang di lakukan oleh pemrakarsa kegiatan atau usaha, akan tetapi masih kurangnya kesadaran / pemahaman masyarakat akan pentingnya kondisi lingkungan yang hijau dan sehat. Kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan akan di arahkan kepada setiap usaha atau kegiatan yang ada di Kabupaten Boalemo meliputi:

- Pengelolaan persampahan di arahkan melalui pengelolaan lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai ekonomis.
- Belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3R oleh masyarakat.
- Masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah.
- Belum efektifnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
- Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembatasan timbulan sampah khususnya penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam.
- Kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah ke sungai, sehingga berdampak pada pencemaran air di sungai
- Pengangkutan sampah belum menjangkau seluruh wilayah perkotaan.
- Belum optimalnya pelayanan pengumpulan sampah dari sumbernya.
- Pengambilan Sampel air dan udara untuk mengetahui secara jelas tinggi rendahnya kandungan atas pencemaran pada air dan udara yang di hasilkan oleh kegiatan perorangan atau kegiatan/usaha.

1.5.2 Bidang Penataan,Penaatan dan Peningkatan Kapasitas

- Pemeriksaan Dokumen lingkungan untuk mengetahui sejauh mana



ketaatan pemrakarsa kegiatan/usaha dalam memahami aturan tentang pengelolaan lingkungan hidup khususnya Wajib AMDAL maupun UKL/UPL.

1.5.3 Bidang Perhubungan

1. Belum terwujudnya kondisi lalu lintas jalan yang berkeselamatan sehingga dibutuhkan lampu peringatan lalu lintas untuk meminimalisir banyaknya lakalantas
2. Keterbatasan kemampuan pendanaan oleh pemerintah daerah menjadi hambatan dalam pengelolaan jaringan jalan didaerah.
3. Belum adanya Rest Area bagi kendaraan yang akan melakukan perjalanan jauh sehingga dapat menimalisir rasa ngantuk saat berkendara;
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dikarenakan alat uji sudah tidak layak, salah satunya Alat uji rem dengan tahun pembuatan 1995 sudah pernah diperbaiki oleh penyedia namun tidak bisa dipakai secara berkelanjutan dan perlu diganti
5. Belum sinerginya koordinasi antar daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kewenangan;
6. Masih adanya kewenangan bidang perhubungan laut yang belum dapat dilaksanakan karena belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum SKPD
- 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- 1.4. Isu Strategis Yang Dihadapi SKPD

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja



2.1. Perencanaan Strategis Sebelum dan Sesudah Review

2.2. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Indikator Kinerja Lainnya (IKL)

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup

4.1. Simpulan

4.2. Saran

Lampiran-Lampiran



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Boalemo, serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo yang telah disusun tentu saja mendukung pencapaian visi dan misi dari Bupati Boalemo. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo merupakan sarana untuk mencapai kinerja yang optimal dalam mendukung perwujudan Misi Bupati.

2.1.1 Visi dan Misi

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kunci keberhasilan yaitu

1. Visi

Terwujudnya lingkungan hidup yang handal dan proaktif menuju pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan dan Sistem Transportasi Yang Baik

2. Misi

- a. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam dengan mempertahankan kelestarian sumber daya alam bagi generasi masa kini dan generasi masa depan.



- b. Meningkatkan upaya pengendalian dan pemulihan pencemaran dan sumber daya alam lingkungan.
- c. Meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan.
- d. Mewujudkan upaya pemulihan kualitas lingkungan secara proaktif.
- e. Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib serta meningkatkan kompetensi di bidang perhubungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo pada dasarnya harus sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Boalemo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			TUJUAN	SASARAN		2025	2026	2027	2028	2029
Bidang Lingkungan Hidup										
1.	Meningkatnya Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan	Terwujudnya infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Sakip OPD Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/ BPK/ BPKP	Predikat Persen	BB 100	A 100	A 100	A 100	AA 100



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			TUJUAN	SASARAN		2025	2026	2027	2028	2029
Bidang Lingkungan Hidup										
	kualitas keselamatan dan layanan transportasi publik			Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan OPD	Persen	60	70	80	85	85
				Jumlah Penerimaan PAD (khusus OPD pemungut PAD) (juta)	Persen	100	100	100	100	
				Presentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Persen	30	45	50	60	
2	Meningkatnya Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan kualitas keselamatan dan layanan transportasi publik	Meningkatkan kualitas air dan udara		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	80.35	80,52	80,70	80,70	80,87	81,04
				- Indeks Kualitas Air	Poin	76.03	76.23	76.43	76.63	76.63
				- Indeks Kualitas Udara	Angka	84.30	84,50	84,70	84,90	85,10
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Angka)	Angka	5	6	7	8	9



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			TUJUAN	SASARAN		2025	2026	2027	2028	2029
Bidang Lingkungan Hidup										
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Lingkungan yang diterbitkan	Jumlah	1	1	1	1	1
		Meningkatkan Luas tutupan lahan		Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)	Persen	84,30	84,50	84,70	84,90	85,10
Bidang Perhubungan										
3	Meningkatkan kualitas tata kelola Perhubungan	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang terintegrasi serta pelayanan di bidang perhubungan	Presentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota	Rasio konektivitas kabupaten/kota = (IK1 x bobot angkuta jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai danau dan penyebranganx 100 %	Persen	32,8	33,2	33,6	34,0	34,0



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			TUJUAN	SASARAN		2025	2026	2027	2028	2029
Bidang Lingkungan Hidup										
			Persentase Pelayanan Uji Berkala dan Keterpenuhan Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penerimaan tanah objek landresform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 i.....x 100 % jumlah penerima tanah objek landreform	Persen	0	0	0	0	0

2.1.3 Strategi Dan Kebijakan

Kondisi kualitas lingkungan Kabupaten Boalemo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini di sebabkan karena meningkatnya pengawasan dan pemantauan lingkungan yang di lakukan oleh pemrakarsa kegiatan akan tetapi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kondisi lingkungan yang sehat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatnya capaian kinerja maka akan di tempuh strategi sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan manajemen publik
2. Menjaga keseimbangan lingkungan yang optimal

Adapun kebijakan yang akan di lakukan adalah :

1. Meningkatkan system pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, lestari, asri dan nyaman.

2.1.4 Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan



terdiri dari 5 (Lima) Program dan 5 (sembilan) kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

TABEL 2.2
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERHUBUNGANKABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Perencanaan Lingkungan Hidup	- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
3.	Pengelolaan Persampahan	- Pengelolaan Sampah
4.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
5.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.1 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) dalam penyusunnya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan ugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat



kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut :Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai saah satu upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo pada Tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Boalemo guna mewujudkan target kinerja sebagaimana pada Tabel 2.3 di bawah ini. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo pada Tahun 2025 telah melaksanakan 5 (lima) program 5 (Lima) kegiatan yang didukung oleh APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 8.255.708.500,90

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran Strategis, Indikator, Target Kinerja, Program dan Anggaran yang telah disepakati antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten dengan Bupati pada Tahun 2025, secara lengkap tercantum pada Tabel 2.3 dibawah ini.



Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Lainnya
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan public	Persentase Penurunan Jumlah temuan	0 %
		Persentase tindak lanjut Inspektorat/BPK /BPKP	100 %
		Nilai Sakip OPD	BB
		Indeks Reformasi Birokrasi	68
		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,75
2	Meningkatkan Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	75,83
		Indeks Kualitas Udara	84.30
3	Meningkatkan Luas Tutupan Lahan	Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)	80,82 %
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan/Penganganan Sampah	Persentase Peningkatan Volume Sampah yang terkelola/tertangani	10 %
5	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang terintegrasi	Persentase perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/kota tersedia	50%
		Persentase Daerah Terpencil yang mendapat akses layanan transportasi	65%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo

Akuntabilitas kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai perencanaan strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo telah melaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025 yang telah di sepakati. Penilaian ini di lakukan oleh Tim Pengelola Kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya di lakukan kategorisasi kinerja (Penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

TABEL 3.1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah



3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan beserta target capaian dan realisasinya sebagaimana dalam table 3.2 berikut :

TABEL 3.2
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET
1.	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan public	Persentase Penurunan Jumlah temuan	Jumlah Temuan Tahun N- 1 - Jumlah Temuan Tahun N dibagi Jumlah Temuan N-1 kali 100%	0 %
		Persentase tindak lanjut Inspektorat/BPK/BPKP	Jumlah Temuan Inspektorat/BPK/BPKP yang telah ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keseluruhan Temuan Inspektorat/BPK/BPKP tahun berjalan kali 100%	100 %
		Nilai Sakip OPD	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	3,75
2.	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_1/L_1)_m^2 + (C_1/L_1)_k^2}{2}}$	75.83 -
		Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - 50X \frac{(IEU - 0,1)}{0,9}$	84.30-
3.	Meningkatkan Luas tutupan lahan	Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka	Luas RTH Tahun ini di kurangi luas RTH Tahun lalu di bagi luas RTH Tahun lalu di kali 100 %	80,82 %



		Hijau)		
4.	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan/ Penanganan Sampah	Persentase Peningkatan Volume Sampah yang terkelola/ tertangani	Volume sampah yang terkelola/ tertangani di bagi volume sampah kali 100 %	10%
5	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang terintegrasi serta pelayanan di bidang perhubungan	Presentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Rasio konektivitas kabupaten/kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai danau dan penyebrangan}) \dots \dots \dots \times 100 \%$	32.8%
		Persentase Pelayanan Uji Berkala dan Keterpenuhan Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penerimaan tanah objek landresform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 i.....x 100 % jumlah penerima tanah objek landreform	0,06%



TABEL 3.3

PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGANKABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	FORMULA	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_1/L_1)_n^2 + (C_1/L_1)_2^2}{2}}$	75.83 %
		Indeks Kualitas Udara		$IKU = 100 - \frac{50 \times (IE - 0,1)}{0,9}$	84.30 %
2.	Meningkatkan luas tutupan lahan	Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas RTH Tahun ini di kurangi luas RTH Tahun lalu di bagi luas RTH Tahun lalu di kali 100 %	80,82 %

TABEL 3.4

PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

N O	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	TARGET
1.	Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab.	Persentase administrasi kantor yang tertata dengan baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah administrasi peralatan kantor yang terpenuhi dan tertata dengan baik di bagi jumlah	100 %



	Boalemo			administrasi kantor yang ada di bagi 100 %	
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor di bagi target kali 100 %	100 %
2.	Meningkatkan pengendalian dan pencemaran lingkungan	- Persentase peningkatan kualitas air - Persentase peningkatan kualitas udara	Program pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Realisasi Tahun berjalan di kurangi realisasi Tahun lalu di bagi realisasi Tahun lalu di kali 100% Realisasi Tahun berjalan di kurangi Tahun lalu di bagi realisasi Tahun lalu di kali 100 %	75.83 % 84.30 %
	Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas air dan udara	- Jumlah titik pantau uji kualitas air - Jumlah titik pantau uji kualitas udara	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	- Jumlah titik pantau uji kualitas air - Jumlah titik pantau uji kualitas udara	4 Titik 4 Titik
3	Meningkatkan Pengelolaan Ruang terbuka Hijau	Persentase Green Open Space (RTH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas RTH Tahun ini di kurangi luas RTH Tahun lalu di bagi luas RTH Tahun lalu di kali 100 %	41,33 %
	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dipelihara	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang di pelihara	6 RTH



			Kabupaten/Kota		
4	Meningkatkan kinerja pengelolaan/penanganan sampah	Persentase Peningkatan volume sampah yang terkelola/tertangani	Program Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang terkelola/tertangani di bagi volume sampah kali 100 %	10 %
	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana persampahan di bagi target pengadaan sarana persampahan kali 100 %	55 %
5	Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan akses ke Daerah terpencil di Kabupaen Boalemo	Persentase kecelakaan Transportasi (Darat, Laut dan Penyeberangan)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Kejadian Kecelakaan Tahun sbelumnya-kejadian kecelakaan tahun berjalan dibagi kejadiiaan kecelaan tahun sebelumnya X100%	61%

3.3 Evaluasi dan Capaian Kinerja

Pengukuran atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 di lakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja dengan menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Penjelasan tentang capaian indicator kinerja dari sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah sebagai berikut:



3.4 Sasaran Strategis :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas air dan udara
3. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan / Penanganan Sampah
5. Meningkatkan Penanganan Masalah Lingkungan
6. Meningkatkan keselamatan lalu lintas dan akses ke Daerah terpencil di Kabupaen Boalemo

Sasaran 1 di atas di capai melalui program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran 2 di atas di capai melalui program :

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan kegiatan :
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

Sasaran 3 di atas di capai melalui program :

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Sasaran 4 di atas di capai melalui program

4. Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Sampah

Sasaran 5 di atas dicapai melalui Program :

5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan:
 - a. Pengujian berkala kendaraan bermotor



TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan public	Persentase Penurunan Jumlah temuan	100% %	100 %-	100 %--
		Persentase tindak lanjut Inspektorat /BPK/BPK P	100 %	100 %	100 %
		Nilai Sakip OPD	BB	100 %	100 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,75	0%-	0 %
2	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air	75,83	-	-
		Indeks Kuaitas Udara	84,30	-	-
3	Meningkatkan Luas tutupan lahan	Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)	80,82 %	27,70%	0 %
4	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang terintegrasi	Presentase perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/kota tersedia	61%	55%	0%



1. Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tolok ukur capaian sasaran *Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik* di ukur dengan 4 (empat) indikator, di mana 2 (dua) indicator telah memenuhi target sebagaimana telah di tetapkan.

a. Indikator : Persentase penurunan temuan

Formula :

$$\frac{\text{Jumlah Temuan Tahun N-1} - \text{Jumlah Temuan Tahun N}}{100 \% \text{Jumlah Temuan N-1}} \times 100 \%$$
$$\frac{0 - 74.000.000}{0} \times 100 \%$$
$$= - (\infty)$$

Realisasi pada indicator ini hasilnya tidak terdefenisi (∞)

b. Indikator Persentase tindak lanjut inspektorat/ BPK/BPKP

Formula :

$$\frac{\text{Jumlah Temuan Inspektorat/BPK/BPKP yang telah ditindaklanjuti}}{100 \% \text{Jumlah Keseluruhan Temuan Inspektorat/BPK/BPKP tahun berjalan}} \times 100 \%$$
$$\frac{74.000.000}{74.000.000} \times 100 \%$$
$$= 100 \%$$

Capaian pada indicator ini adalah 100 % sesuai target yang di tentukan.

c. Indikator : Nilai Sakip OPD

Formula : Predikat / Hasil Evaluasi Sakip dari Inspektorat.

d. Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Formula : Hasil Survey

Realisasi = 0 %



Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo belum mengukur tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanan pengelolaan sampah, hal ini akan di tindaklanjuti pada tahun mendatang.

2 Sasaran : Meningkatkan kualitas air dan udara

Sasaran ini di ukur dengan 2 (dua) Indikator, yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

c. Indikator : Indeks Kualitas Air (IKA)

Realisasi Indikator Indeks Kualitas air adalah 0, Tidak terealisasinya Indeks Kualitas Air (IKA) dapat disebabkan oleh berbagai faktor, terutama terkait dengan peningkatan pencemaran, tantangan dalam pemantauan, dan manajemen sumber daya air yang belum efektif.

Faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ini meliputi:

- **Pencemaran Air:** Ini adalah penyebab paling signifikan. Limbah dari berbagai sumber, seperti limbah industri (logam berat, bahan kimia beracun), limbah domestik (deterjen, kotoran), dan limbah pertanian (pupuk, pestisida), sering kali tidak diolah dengan benar sebelum dibuang ke sumber air. Hal ini secara langsung menurunkan kualitas air dan membuatnya sulit mencapai standar indeks yang ditetapkan.
- **Pertumbuhan Populasi dan Urbanisasi:** Kenaikan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan air dan volume air limbah yang dihasilkan, memberikan tekanan besar pada sumber daya air yang ada.
- **Perubahan Tata Guna Lahan:** Perubahan dari lahan hijau menjadi area terbangun (pemukiman, industri) mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan secara alami dan meningkatkan limpasan permukaan yang membawa polutan ke badan air.
- **Perubahan Iklim:** Perubahan iklim menyebabkan pola cuaca yang tidak menentu, seperti musim kemarau yang panjang dan banjir yang merusak. Hal ini dapat memperburuk ketersediaan dan kualitas air dengan mengeringkan sumber air atau meningkatkan konsentrasi polutan selama banjir.
- **Infrastruktur yang Buruk:** Keterbatasan dan kinerja yang tidak efisien dari sistem layanan penyediaan air bersih dan fasilitas pengolahan air limbah menjadi



hambatan dalam menjaga kualitas air.

- Keterbatasan Pemantauan dan Data: Terdapat tantangan dalam pemantauan kualitas air yang tepat dan berkelanjutan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang menyebabkan data yang kurang akurat atau tidak lengkap untuk evaluasi dan pengambilan keputusan yang efektif.
- Eksploitasi Berlebihan Sumber Air: Penggunaan sumber air, terutama air tanah, secara berlebihan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan juga berkontribusi pada penurunan kualitas dan kuantitas air.

Untuk meningkatkan realisasi indeks kualitas air, diperlukan upaya terkoordinasi dalam pengelolaan limbah, penegakan hukum yang ketat terhadap pencemar, investasi dalam infrastruktur pengolahan air, serta pemantauan kualitas air yang lebih komprehensif.

Faktor Pendorong :

1. Pemberian rekomendasi izin lingkungan secara ketat bagi usaha yang membuang limbah ke sungai sehingga mampu mengurangi pembuangan sampah ke sungai.

Faktor Penghambat :

2. Sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai sering membuang sampah ke sungai.

Solusi :

3. Melakukan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta

Faktor Pendorong :

1. Pemberian rekomendasi izin lingkungan secara ketat bagi usaha yang membuang limbah ke sungai sehingga mampu mengurangi pembuangan sampah ke sungai.

Faktor Penghambat :

1. Sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai sering membuang sampah ke sungai.

Solusi :

2. Melakukan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai seperti tidak membuang sampah ke sungai.



b. Indikator : Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) tetap ada dan dihitung meskipun upaya untuk memperbaiki kualitas udara (realisasi) belum menunjukkan hasil atau tidak ada. IKU adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa bersih atau tercemar udara di suatu wilayah pada waktu tertentu, berdasarkan konsentrasi berbagai polutan

Fungsinya adalah sebagai berikut:

- Pemantauan dan Pelaporan: Memberikan data objektif mengenai kondisi udara saat ini kepada publik dan pihak berwenang
- Dasar Pengambilan Keputusan: Meskipun realisasi kebijakan mungkin tertunda atau tidak efektif, data IKU berfungsi sebagai bukti ilmiah yang menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut atau perubahan strategi.
- Peringatan Kesehatan Masyarakat: Memberi tahu masyarakat tentang potensi risiko kesehatan dan membantu mereka mengambil tindakan pencegahan, seperti membatasi aktivitas luar ruangan saat IKU tinggi

Jadi, tidak adanya hasil nyata dari upaya perbaikan justru akan tercermin pada nilai IKU yang tetap tinggi (menunjukkan kualitas udara buruk), yang kemudian menekankan urgensi masalah tersebut. Informasi kualitas udara di Indonesia dapat dilihat melalui website resmi KLHK atau menggunakan aplikasi pemantau kualitas udara, seperti nafas.

Faktor Pendorong :

1. Adanya kegiatan pemantauan kualitas udara
2. Adanya RTH yang mempertahankan tanaman perindang sehingga mampu menjaga kualitas udara.

Faktor Penghambat :

1. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor terutama pada jam-jam masyarakat beraktivitas.
2. Kurangnya kesadaran dalam melakukan penghijauan yang merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara.

Solusi :

1. Meningkatkan kepedulian dan informasi lingkungan kepada masyarakat
2. Menambah Luasan Ruang terbuka Hijau



3. Menggalakkan penghijauan di lingkungan masyarakat untuk meningkatkan suasanalingkungan yang sehat.

3 Sasaran : Meningkatkan Luas Tutupan Lahan

a. Indikator : Persentase Green Open Space (RTH)

Formula :

$$\frac{\text{Luas RTH tahun ini} - \text{Luas RTH tahun lalu}}{100 \% \text{Luas RTH tahun lalu}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{41,33 \text{ Ha} - 41,33 \text{ Ha}}{41,33 \text{ Ha}} \times 100 \% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Sasaran Meningkatkan luas tutupan lahan dengan indicator persentase Green Open Space (RTH) melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau belum mengalami peningkatan karena keterbatasan lahan yang dapat di manfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini dapat di lihat dari capaian kinerja.

Faktor Pendorong :

1. Ruang Tebuka Hijau minimal 30 % dari luasan kabupaten Bolaemo
2. Kabupaten Boalemo memiliki Ruang Terbuka Hijau.

Faktor Penghambat :

1. Upaya peningkan luas runag terbuka hijau terkendala dengan keterbatasan lahan yang dimanfaatkan sebagai Ruang terbuka Hijau.
2. Seringkali terkendala dengan kepentingan public yang lain misalnya pohon perindangjalur hijau mengganggu kabel listrik.

Solusi :

1. Memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik pemerintah daerah yang dapat digunakan untk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau.
2. Meningkatkan penanaman pohon perindang.
3. Meningkatkan kualitas taman/RTH dengan perbaikan fasilitas dan elemen pendukungtaman untuk menambah estetika dan keindahan taman/RTH.



TABEL 3.6
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air	75,83%	-	%
		Indeks Kuaitas Udara	84,30%	-	%
2	Meningkatkan Luas tutupan lahan	Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)	80,82%	41,33%	%

Berdasarkan Tabel di atas bahwa indicator yang tidak memenuhi target adalah indicator Persentase Green Open Space (RTH) yang merupakan indikator dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau , di mana realisasi kinerja adalah 41,33 %

TABEL 3.7
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN
1	Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Boalemo	Persentase administrasi kantor yang tertata dengan baik	100 %	100 %	100 %
	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai</i>	<i>Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan pengendalian dan pencemaran lingkungan	- Persentase peningkatan kualitas air	75,83%	0 %	0 %



		- Persentase peningkatan kualitas udara	84,30%	0 %	0 %
	<i>Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas air dan udara</i>	- Jumlah titik pantau uji kualitas air	5 Titik	0 Titik	0 %
		- Jumlah titik pantau uji kualitas udara	5 Titik	0 Titik	0 %
	<i>Terlaksananya kegiatan penanganan masalah lingkungan</i>	<i>Persentase Peningkatan penanganan masalah lingkungan</i>	80 %	%	%
3	Meningkatkan Pengelolaan Ruang terbuka Hijau	Persentase Green Open Space (RTH)	80,82%	41,33%	%
	<i>Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</i>	<i>Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dipelihara</i>	6 RTH	6 RTH	%
4	Meningkatkan kinerja pengelolaan/ penanganan sampah	Persentase Peningkatan volume sampah yang terkelola/ tertangani	10 %	10 %	%
	<i>Tersedianya sarana dan prasarana persampahan</i>	<i>Persentase tersedianya sarana dan prasarana persampahan</i>	55 %	55%	%

Dari tabel di atas menunjukkan capaian kinerja dari program dan kegiatan, di mana beberapa indikator belum mencapai target sebagaimana yang di harapkan.

1. Indikator Persentase administrasi kantor yang tertata dengan baik

Indikator ini merupakan Indikator Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian kinerja dari indikator ini adalah 100 %, dengan tolok ukur Jumlah administrasi peralatan kantor yang terpenuhi dan tertata dengan baik di bagi jumlah administrasi kantor yang ada di kali 100 %. Di mana pemenuhan administrasi kantor terealisasi 100 %.

2. Indikator Persentase kualitas air dan peningkatan kualitas udara.

Indikator ini merupakan indikator Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan lingkungan. Formula Pengukuran Realisasi Tahun berjalan di



kurangi realisasi Tahun lalu di bagi realisasi Tahun lalu di kali 100%. Realisasi Tahun berjalan 0 % dan Realisasi kinerja tahun lalu 0 % .Capaian Indikator Persentase kualitas air adalah 0% dari target 75,83 %. Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah sebagai berikut :

- a. Masih adanya perilaku buang air sembarangan di sungai.
- b. Sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai sering membuang sampah kesungai.

Capaian Indikator Peningkatan Kualitas udara adalah 0 %. Formula Pengukuran Realisasi Tahun berjalan di kurangi realisasi Tahun lalu di bagi realisasi Tahun lalu di kali 100%. Realisasi kinerja Tahun berjalan 0 % dan realisasi tahun lalu 0 %, tidak terdapat peningkatan kinerja, namun dengan capaian kinerja 84.30 % kualitas udara dalam kondisi tidak tercemar.

Adapun indicator kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah titik pantau uji kualitas air dan jumlah titik pantau uji kualitas udara. Indikator ini merupakan indicator kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan. Target kinerja masing-masing adalah 5 titik pantau uji kualitas air dan udara di mana Capaian kinerja pada indicator ini adalah hanya masing - masing 3 titik pantau atau sebesar 0 %. Factor penyebab tidak tercapainya target adalah terbatasnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan ini.
2. Indikator Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup
Indikator ini merupakan Indikator dari kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dengan target kinerja 2 Dokumen kajian lingkungan hidup (Dokumen DIKPLHD dan D3TLH) Realisasi adalah 1 dokumen (D3TLH) atau capaian 50 %. Faktor penyebab tidak tercapainya target adalah belum terdapat peta D3TLH sehingga dokumen D3TLH belum dapat di susun. Persentase Peningkatan penanganan masalah lingkungan.

Indikator ini merupakan indicator kinerja kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan dengan target 80 % dengan realisasi 60 %. Formula pengukuran Jumlah Masalah Lingkungan yang tertangani di dibagi Jumlah pengaduan



masalah lingkungan kali 100 %. Jumlah masalah lingkungan yang merupakan laporan masyarakat yaitu 5 laporan, dan yang tertangani adalah 3 laporan sehingga capaian sebesar 60 %. Factor penyebab tidak tercapainya target adalah :

- kurangnya informasi masalah yang di laporkan sehingga menghambat proses penanganan
- kurangnya tenaga teknis
- ketakutan masyarakat dalam melaporkan secara tertulis

3. Indikator Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)

Formula :

$$\frac{\text{Luas RTH tahun ini} - \text{Luas RTH tahun lalu}}{100 \% \text{Luas RTH tahun lalu}} \times$$

$$\text{Realisasi} = \frac{41,33 \text{ Ha} - 41,33 \text{ Ha}}{0 \text{ Ha}} \times 100 \%$$

Sasaran Meningkatkan luas tutupan lahan dengan indicator persentase Green Open Space (RTH) melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau belum mengalami peningkatan karena keterbatasan lahan yang dapat di manfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini dapat di lihat dari capaian kinerja. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja adalah antara lain Upaya peningkatan luas runag terbuka hijau terkendala dengan keterbatasan lahan yang di manfaatkan sebagai Ruang terbuka Hijau dan Seringkali terkendala dengan kepentingan public yang lain misalnya pohon perindang jalur hijau mengganggu kabel listrik.

Adapun indicator kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang di pelihara

Indikator ini merupakan indicator kinerja dari Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, dengan target 6 RTH, Realisasi 6 RTH sehingga capaian 100%

4. Persentase Peningkatan volume sampah yang terkelola/tertangani



Indikator ini merupakan indicator kinerja Program Pengembangan Kinerja Persampahan dengan target kinerja 10 % dan realisasi kinerja 10%. Formula pengukuran Volume sampah yang terkelola/tertangani di bagi volume sampah kali 100 %. Sampah yang terkelola/tertangani adalah 1406 Ton/Tahun. Meskipun capaian indicator ini sudah melebihi target namun masih ada permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan di antaranya :

- a. Perilaku masyarakat yang kurang tertib dalam hal waktu dan membuang sampah tidak pada tempatnya.
- b. Minimnya sarana angkutan sampah.

Adapun indikator kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

- a. Persentase tersedianya sarana dan prasarana persampahan Indikator ini merupakan indicator kinerja Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dengan target 55 %, realisasi 55 %. Formula pengukuran Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana persampahan di bagi target pengadaan sarana persampahan kali 100 %. Target pemenuhan sarana persampahan terdiri dari 2, yaitu pengadaan tong sampah dan bak sampah . namun yang terealisasi tidak terpenuhi karena minimnya anggaran.

3.5 Analisis Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja perlu di lakukan perbandingan untuk melihat peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja sehingga menjadi bahan evaluasi untuk di perbaiki guna peningkatan kinerja tahun berikutnya. Adapun perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :



TABEL 3.8
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024-
2025

NO	INDIKATOR KINERJA	2024	2025			PERBANDINGAN
		REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Persentase Penurunan Jumlah temuan	100 %	100 %	100 %	100 %-	100 %
	Persentase tindak lanjut Inspektorat/BPK/BP KP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Nilai Sakip OPD	BB	BB	BB	BB	BB
	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.5	3.75	3.75	3.75	3.75
	Indeks Kualitas Air	0 %	75,83 %	0 %	0 %	0 %
	Indeks Kualitas Udara	0 %	84,30 %	0 %	0 %	0 %
	Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)	41.33 %	41.33 %	41.33 %	41.33 %	0 %

INDIKTOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET JANGKA MENENGAH TAHUN 2024	CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase Penurunan Jumlah temuan	%	100 %	100 %-	-100 %	100 %	100 %
Persentase tindak lanjut Inspektorat/BPK/BP KP	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nilai Sakip OPD	Nilai Akreditasi	BB	BB	BB	BB	BB
Indeks Kepuasan Masyarakat		3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Indeks Kualitas Air	%	59,9 %	0 %	0 %	59,9%	0 %



Indeks Kualitas Udara	%	90,83 %	0 %	0 %	90,83%	0 %
Persentase Green OpenSpace (Ruang Terbuka Hijau)	%	30 %	%	%	30%	0 %

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2024 DENGAN TARGET
JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA**

3.6 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 dapat di lihat dari table berikut in



TABEL 3.10
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN				EFISIENSI	SUMBER DATA
				TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%		
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan public	Persentase administrasi kantor yang tertata dengan baik	%	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.235.544.318,40	4.944.377.089,00	94%	6%	Sekretariat
		Rata-rata capaian dari 1 Indikator				100	Total per sasaran	5.235.544.318,40	4.944.377.089,00	94%	6%	
2	Meningkatkan kualitas air dan udara	- Persentase peningkatan kualitas air	%	75,83	0	0	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusaka	-	-	-	-	Bid. Pengelolaan Sampah Limbah dan Bid. P3SPK
			%	15	-	-						

		- Persentase peningkatan kualitas udara					n Lingkungan Hidup						
		Rata-rata capaian dari 1 Indikator				85.7	Total per sasaran	-	-	-	-		
3	Meningkatkan luas tutupan lahan	Persentase Green Open Space (RTH)	%	41,33	41,33	21.20	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	11.188.997,50	7.430.000,00	66%	34%	Bid. Pengelolaan Sampah Limbah	
		Rata-rata capaian dari 1 Indikator				21.20	Total per sasaran	11.188.997,50	7.430.000,00	66%	34%		
4	Meningkatkan kinerja pengelolaan/ penanganan sampah	Persentase Peningkatan volume sampah yang terkelola/tertangani		1406	1406		Program Pengelolaan Persampahan	1.591.742.000,00	1.539.469.050,00	97%	3%	Bid. Pengelolaan Sampah Limbah	1.82

		Rata-rata capaian dari 1 Indikator		21.20	Total per sasaran	1.591.742.000,00	1.539.469.050,00	97%	3%	
5.	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang terintegrasi serta pelayanan di bidang perhubungan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	55%	55%	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.327.183.185,00	1.223.181.495,00	92%	8%	Bid. Perhubungan
		Rata-rata capaian dari 1 Indikator				1.327.183.185,00	1.223.181.495,00	99,85	0	

Untuk mencapai keberhasilan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo melalui 5 (Lima) Program. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat di katakan bahwa pencapaian indicator Persentase Peningkatan volume sampah yang terkelola/tertangani dari program pengembangan kinerja persampahan di lakukan dengan penggunaan Sumber Daya yang efisien, karena pencapaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase penggunaan dana.

3.7 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok guna merealisasikan target kinerja yang telah di tetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo sebagaimana tertuang dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo dengan Total anggaran Rp. 8.255.708.500,00.- dan realisasi Rp. 7.777.339.364,00 atau 94 %.

TABEL 3.11
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.235.544.318.40	4.944.377.089.00	94 %
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS	90.050.000,-	83.384.050,-	93 %

3.	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	1.591.742.000	1.539.469.050	97 %
4.	Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	11.188.997.50,	7.430.000	66 %
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.327.183.185	1.223.181.495	92 %

3.7.1 Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2025

TABEL. 3.12

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

Kegiatan	Sumber	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I Belanja Pegawai	DAU	4.332.190.021.20	4.126.395.853	95.25 %

Jika melihat tabel di atas, Realisasi Belanja tidak langsung sebesar 95,25 % , hal ini disebabkan proses mutasi perpindahan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dan proses kenaikan pangkat serta kenaikan gaji berkala pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan masih cenderung normal

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun, untuk mengevaluasi capaian sasaran Rencana Kerja tahun 2025 serta kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan/sasaran, langkah yg telah dilakukan dalam mengatasi hambatan/kendala serta Langkah-langkah antisipatif di masa datang. Dari analisis 7 sasaran, terdapat 7 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2025, 4 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 99 % dari total indikator, Sementara itu, sebanyak 3 indikator belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Indikator kinerja utama yang tidak mencapai target seperti Persentase Indeks Kualitas Air dan Udara, Jumlah perusahaan taat lingkungan dan Cakupan Pengelolaan Sampah. Sehingga harus dilakukan upaya percepatan pencapaian target pada tahun 2025.

Untuk mencapai indikator dan kinerja perlu adanya komitmen pemimpin dan dukungan dari jajaran staf Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo serta anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan. Untuk tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo perlu meningkatkan kinerja dengan melakukan upaya-upaya dalam peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, perlunya koordinasi dan sinergitas dalam pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman serta pengelolaan lingkungan sehingga kegiatan dapat lebih terencana dan terarah dalam pengelolaannya.

4.2 Saran

Untuk percepatan pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo akan terwujud apabila dilakukan koordinasi dan pendataan yang baik. Selain itu, pemenuhan kebutuhan SDM di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Boalemo sangat mutlak diperlukan

terutama tenaga pelaksana di Bidang Teknik Sanitasi, Penegakan Hukum Lingkungan, Teknik Lingkungan, sehingga perlu diadakan tenaga dengan kualifikasi tersebut.

Demikian dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahun 2025 dan bahan evaluasi perbaikan untuk tahun yang akan datang.

Tilamuta, Desember 2025

Plt.KEPALA DINAS



Drs.Teguh Jatmika

Pembina Utama Muda

Nip. 19690724 199404 1 001